

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

**TAHUN 2019  
KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019. Laporan ini menyajikan informasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penyajian informasi pencapaian target kinerja dalam laporan tersebut, sejauh mungkin harus dikaitkan dengan target kinerja pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja atas tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo pada Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini, masih jauh dari kata sempurna namun kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat pula menjadi sumber informasi yang memadai sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Situbondo di masa mendatang, khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019 mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitu:

**Pertama,** Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*/pemangku kepentingan, Instansi pemerintah pusat/daerah dan masyarakat; dan

**Kedua,** Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Oleh sebab itu untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan tentang informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2019 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama

Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Perubahan 2016-2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo. Capaian Kinerja (*Performance Result*) ini merupakan realisasi program dan kegiatan selama Tahun 2019 yang diarahkan bagi pemenuhan sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019. Penyampaian Informasi Kinerja ini juga merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Akhir kata dengan senantiasa selalu mengharap ridho dari Allah SWT, selanjutnya kami berharap pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Situbondo Tahun 2019 ini, akan menjadi pendorong dan motivasi dalam rangka pelaksanaan percepatan peningkatan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo kedepan.

Situbondo, 20 Januari 2020.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN SITUBONDO**



**Ir. H. EKO PRAYUDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610726 199307 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>1.2 LANDASAN HUKUM</b> .....	1
<b>1.3 MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	2
<b>1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> .....	3
<b>1.5 STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	4
<b>1.6 KONDISI KEPEGAWAIAN</b> .....	7
<b>1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN</b> .....	7
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	9
<b>2.1 RENCANA STRATEGIS 2016-2021</b> .....	9
<b>2.1.1 Pernyataan Visi</b> .....	9
<b>2.1.2 Pernyataan Misi</b> .....	9
<b>2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis</b> .....	10
<b>2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b> .....	11
<b>2.3 PERJANJIAN KINERJA 2019</b> .....	11
<b>2.4 PERENCANAAN ANGGARAN 2019</b> .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
<b>3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA</b> .....	14
<b>3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA</b> .....	15
<b>3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN</b> .....	19
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	29
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. SK IKU Perangkat Daerah	
2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2019 yang telah ditandatangani	
3. Rencana Strategis ( Tabel 4.1 dan Tabel 6.1)	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 (Laporan Perkembangan Kinerja Kepala OPD dan Pejabat Administrator Triwulan IV 2019)	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama DPKP Kab. Situbondo.....	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 DPKP Kab. Situbondo.....	12
Tabel 2.3	Perencanaan Anggaran Tahun 2019 DPKP Kab. Situbondo .....	13
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2019.....	15
Tabel 3.2	Lokasi Kawasan Kumuh.....	17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja DPKP Kab. Situbondo.....	17
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra DPKP Kab. Situbondo .....	18
Tabel 3.5	Tingkat Efisiensi Kinerja Anggaran.....	20
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2019 .....	20

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo .....	5
Gambar 3.1	Diagram Alokasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Utama.....	19

## IKHTISAR EKSEKUTIF

*Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2019, ada 1 (satu) sasaran yaitu meningkatkannya kualitas perumahan dan permukiman dan ada 2 (dua) indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Indikator tersebut adalah 1). Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni dan 2) Persentase penurunan kawasan kumuh. Dua indikator ini dicapai melalui 3 program pembangunan dan 5 kegiatan.*

*Capaian realisasi untuk indikator Persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni adalah 116%, dengan Persentase realisasi sebesar 50,46% dari target sebesar 43,41%. Target jumlah RTLH yang harus diperbaiki tahun ini adalah sebanyak 500 unit rumah. Namun DPKP dapat menambah jumlah target menjadi 1031unit, hal ini karena DPKP mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat di bidang Perumahan sebanyak 170 unit dan usulan dari DPRD sebanyak 96 unit dan dari Program BSPS sebanyak 265 unit. Dari 1031 unit dapat dilaksanakan sebanyak 1006 unit, 25 unit tidak dapat dilaksanakan karena pemilik rumah ada yang meninggal dunia dan ada yang pindah alamat. Jadi sampai dengan tahun 2019, DPKP sudah merehabilitasi RTLH sebanyak 6.642 unit rumah dari 13.141 unit rumah yang harus terselesaikan. Sehingga capaian indikator penurunan rumah tidak layak huni sebesar 50,46%.*

*Capaian realisasi untuk indikator penurunan kawasan kumuh yang ditangani pada tahun 2019 adalah 100% dari target 60,54 % terealisasi sebesar 60,54 %. Pada tahun 2019 ini DPKP sudah melaksanakan penataan kawasan kumuh seluas 52.2 Ha dari total kawasan 132.3 Ha sehingga untuk permukiman kawasan kumuh di Kabupaten Situbondo tersisa 60.55%. Target dan capaian ini sama dengan tahun sebelumnya karena masih terdapat permasalahan kekumuhan pada lokasi yang sama yaitu Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo.*

*Program yang mendukung upaya pencapaian indikator ini adalah Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman serta Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan. Adapun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan guna mendukung penurunan kawasan kumuh diantaranya adalah pembangunan saluran drainase, rehabilitasi jalan lingkungan, pembangunan jamban, MCK, pembangunan taman, dll.*

*Capaian kinerja keuangan juga menunjukkan hasil yang memuaskan, secara keseluruhan kinerja keuangan terealisasi sebesar 94%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya dibidang perumahan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Situbondo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo sepenuhnya akan menjalankan peran strategisnya agar menjadi dinas yang lebih profesional dibidangnya menuju Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah yang lebih akuntabel. Dimana dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo akan selalu mendukung sepenuhnya program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dari tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Atas Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2019 tentang Situbondo Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo No. 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama;
18. Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/352/P/004.2/2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini yaitu untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 dalam pencapaian sasaran, target dan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini adalah sebagai bahan akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan serta untuk penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai arah dan kebijakan yang diperlukan.

#### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo berdasarkan kepada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondomempunyai tugas utama yaitu :

**Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

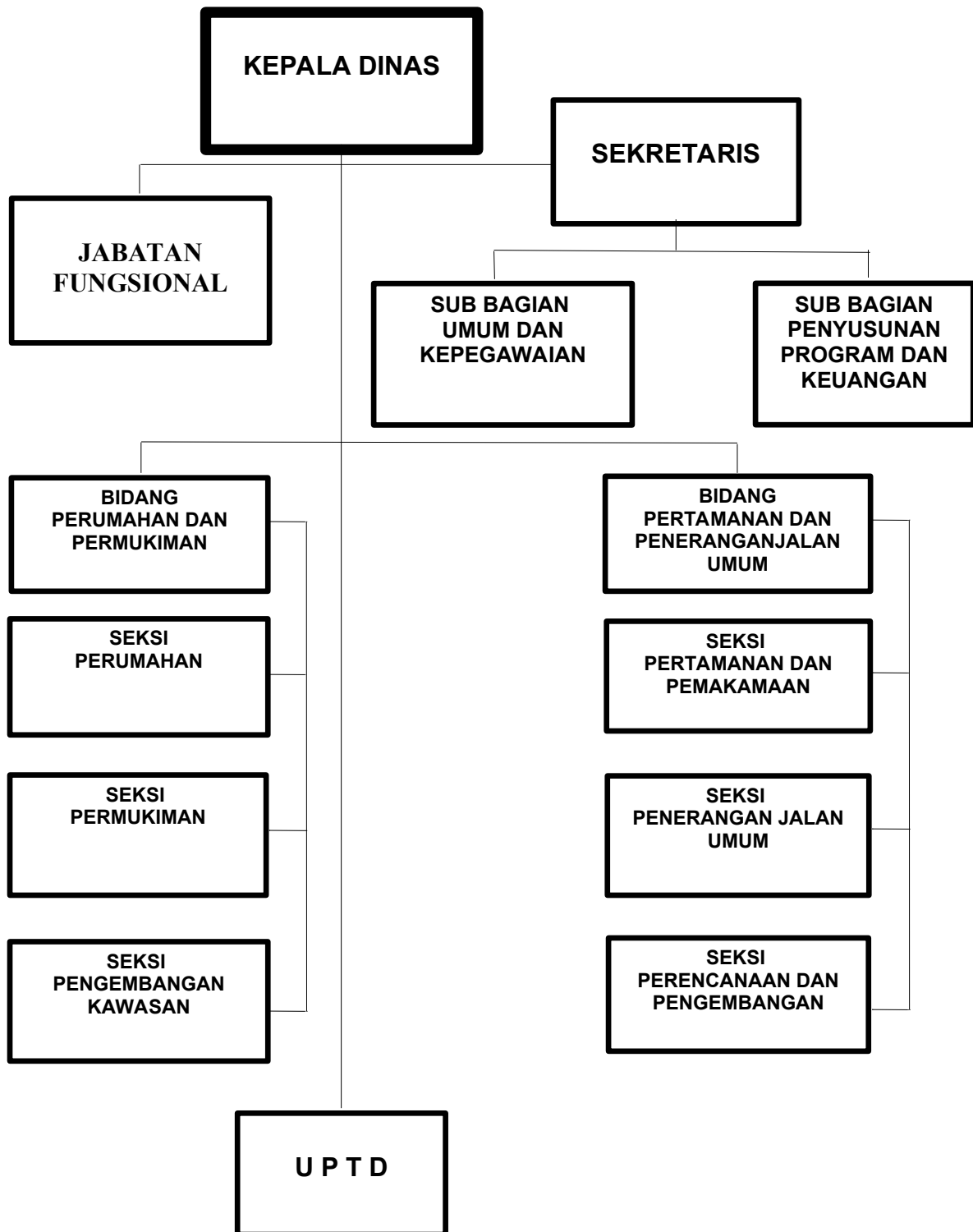
- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.5 Struktur Organisasi**

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dan dibebarkannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondoesuai dan berdasarkan kepada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo; dan
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo dengan memiliki susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo dalam penjabaran tugas pokok dan fungsinya menjalankan sistem, prosedur dan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas membantu dalam menyusun pedoman kebijakan teknis perencanaan, operasional, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perencanaan teknis pengadaan, pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perumahan dan Permukiman membawahi :

a. Seksi Perumahan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi sarana prasarana serta penataan dikawasan perumahan

b. Seksi Permukiman

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan seta fasilitasi di bidang kawasan permukiman

c. Seksi Pengembangan Kawasan

Seksi Pengembangan Kawasan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan kawasan

#### 4. Bidang Pertamanan Dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas penyusunan pedoman kebijakan teknis perencanaan, operasional, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perencanaan teknis pengadaan, pelaksanaan pengelolaan urusan di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum serta pemakaman.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum membawahi :

##### a. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Mempunyai tugas menyusun pedoman kebijakan teknis perencanaan operasional, pembinaan, pengawasan dan pengembangan perencanaan teknis pengadaan, pelaksana pengelolaan urusan di bidang pertamanan dan pemakaman

##### b. Seksi Penerangan Jalan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operasional, serta pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum

##### c. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum.

### 1.6 Kondisi Kepegawaian

Sumber daya utama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo adalah jumlah personil sampai dengan saat ini berjumlah 230 orang yang terdiri dari 84 orang PNS, 5 orang THLP 2 orang Tenaga Teknik Akuntansi dan 139 tenaga kontrak.

### 1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

#### 1. BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, kondisi kepegawaian serta sistematika penyajian.

#### 2. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini di jelaskan mengenai rencana strategis 2016-2021, indikator kinerja utama (IKU) dan perjanjian kinerja 2019 serta perencanaan kinerja dan anggaran 2019.

### 3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan pengukuran capaian kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisisnya serta capaian kinerja dan anggaran

### 4. BAB IV Penutup

Mengemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran pada bagian ini adalah dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2019. Lampiran-lampiran tersebut adalah:

1. SK IKU PD (Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah)
2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2019 yang telah ditandatangani
3. Rencana Strategis (Tabel 4.1);
4. Pengukuran Kinerja 2019 (Laporan Perkembangan Kinerja Kepala OPD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2019)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis 2016-2021**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo, maka dalam rencana strategisnya dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo yaitu mencakup tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang selanjutnya akan diuraikan dalam bab ini.

##### **2.1.1 Pernyataan Visi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo serta dengan melihat latar belakang yang ada, maka Visi Bupati Situbondo Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 ditetapkan sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI,  
MANDIRI SERTA LEBIH BERIMAN, SEJAHTERA DAN  
BERKEADILAN“**

Dan untuk menjabarkan Visi yang telah ditetapkan dan guna mewujudkan cita-cita yang diidam-idamkan tersebut, maka Bupati Situbondo terpilih Tahun 2016-2021 telah menetapkan pula 4 (empat) Misi pada RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 untuk mendukung implementasi dan pencapaian Visi dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas hidup sejahtera dan berkeadilan;
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan.

##### **2.1.2 Pernyataan Misi**

Telaahan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat ditunjukkan pada MISI ke 4 (empat) yaitu :



**“MEMANTAPKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG  
PEMENUHAN HAK DASAR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN ”**

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo berperan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman demi meningkatnya *kualitas infrastruktur yang berkelanjutan* dengan indikator *indeks kepuasan layanan infrastruktur*.

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategi**

#### **1. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo dapat secara tepat dan cepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam memenuhi visi dan misi Bupati Situbondodalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan semua sumberdaya dan kemampuan yang dimilikinya. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo untuk mengatur dan mengukur sejauh mana Tujuan dan Sasaran organisasi dilaksanakan.

Tujuan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Situbondo adalah:

**“ MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
LAYAK HUNI ”**

#### **2. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondoadalah merupakan suatu penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan dialokasikan dalam kurun waktu 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan/atau kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondoini merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi

Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo, serta lebih dapat menjamin akan suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya lebih menyeluruh yang berarti pula menyangkut keseluruhan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo. Sasaran-sasaran yang ditetapkan haruslah sepenuhnya dapat mendukung atas pencapaian tujuan yang terkait. Adapun sasaran strategis pada Perubahan Renstra 2016 – 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo adalah

**“MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN”**

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**DPKP Kab. Situbondo**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program/Kegiatan	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Persentase penurunan rumah tidak layak huni 2. Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	1. Program Pengembangan Perumahan  1. Program lingkungan Sehat Perumahan Dan Permukiman 2. Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan	DPKP  DPKP DPKP

## 2.3 Perjanjian Kinerja 2019

Penetapan Kinerja merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo. Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2019 disusun mengacu pada Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo ditetapkan dan sesuai dengan Matriks Perubahan Renstra 2016-2021 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman serta dengan nilai anggaran sesuai dengan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo yang terdapat pada DPA Perubahan tahun anggaran 2019.

Penetapan Kinerja tahun 2019 yang merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**DPKP Kab. Situbondo**

No .	Sasaran Strategis / Dukungan	Indikator Kinerja	Target 2019
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1. Persentase penurunan rumah tidak layak huni 2. Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	43,41% 60,54%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP perangkat daerah	81,30 A

#### **2.4 Perencanaan Anggaran 2019**

Perencanaan anggaran pada program-program yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019 yang di dilaksanakan oleh pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Perencanaan Anggaran Tahun 2019**  
**DPKP Kab. Situbondo**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Plafond
1	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	Program Pengembangan Perumahan	1.798.750.000,- (APBD) 2.975.000.000,- (DAK) 8.940.000.000,- (Hibah) 4.637.500.000,- (APBN)
2	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	Program lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	6.972.103.000,- (APBD) 8.312.500.000,- (DAK) 1.250.000.000,- (Hibah)
		Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan	16.251.912.000,- (APBD)

Tabel 2.3 memberikan gambaran tentang anggaran untuk masing-masing indikator utama. Program-program yang dilaksanakan di DPKP selain didukung dari dana APBD juga didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Bidang Sanitasi serta dana dari APBN untuk Program Pengembangan Perumahan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan unit organisasi sebagai penjabaran dari strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada setiap unit organisasi.

Jadi Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan pengertian di atas, secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo telah dapat melaksanakan tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Perumahan dan Permukiman baik terhadap program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis.

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama merupakan isian data kinerja dari Target dan Realisasi Tahun 2019 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019**

No .	Sasaran Strategis/ Dukungan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1. Persentase penurunan rumah tidak layak huni	43,41	50,54	116
		2. Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	60,54	60,54	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase penurunan rumah tidak layak huni	81,30 A	80,98 A	

**Realisasi Persentase Penurunan RTLH didapat dengan formula**

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah tidak layak huni yang ditangani sampai dengan tahun n}}{\text{Total jumlah RTLH}}$$

$$= \frac{6.642}{13.141} = 50,54 \%$$

**Realisasi Persentase Penurunan Kawasan Kumuh didapat dengan formula**

$$= \frac{\text{Total Luas Kawasan Kumuh} - \text{Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sampai th n}}{\text{Total luas kawasan kumuh}}$$

$$= \frac{132,32 - 52,20}{132,32} = 60,54 \%$$

Capaian indikator persentase penurunan rumah tidak layak huni sebesar 116%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja dari DPKP sangat berhasil. Begitu juga persentase penurunan kawasan permukiman kumuh yang mencapai 100%.

**3.2 Analisis Capaian Kinerja**

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui capaian kinerja DPKP Kab. Situbondo sebagai berikut:

## **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

### **Indikator 1 : Persentase penurunan rumah tidak layak huni**

Realisasi indikator ini adalah sebesar 50,54 % dari target sebesar 43,41 %, dengan capaian realisasi sebesar 116%. Target jumlah RTLH yang harus diperbaiki tahun ini adalah sebanyak 500 unit rumah. Namun DPKP dapat menambah jumlah target menjadi 1031 unit. Jumlah ini meningkat karena adanya tambahan usulan dari DPRD sebanyak 96 unit, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan sebanyak 170 unit dan dari dana Pusat (APBN) melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan swadaya) sebanyak 260 unit. Dari 1031 unit dapat dilaksanakan sebanyak 1006 unit, 25 unit tidak dapat dilaksanakan karena pemilik rumah ada yang meninggal dunia dan ada yang pindah alamat. Jadi sampai dengan tahun 2019, DPKP sudah merehabilitasi RTLH sebanyak 6.642 unit rumah dari 13.141 unit rumah yang harus terselesaikan.

Adapun capaian kinerjanya dapat dikategorikan baik karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) dan masyarakat penerima bantuan sosial untuk melaksanakan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sesuai yang telah direncanakan. Program yang mendukung upaya pencapaian indikator ini adalah Program Pengembangan Perumahan melalui Bantuan Sosial yang dikerjakan langsung oleh penerima melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) serta bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dan Dana APBN melalui Proram BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Situbondo.

### **Indikator 2 : Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh**

Luasan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/396/P/006.2/2014 tentang Lokasi Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Situbondo. Pada Tahun 2019 dilakukan analisa dan strategi penanganan kawasan kumuh melalui Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/175/P/004.2/2019 tentang Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Situbondo (RP2KPKP). Berdasarkan kajian tersebut didapat luas kawasan sebagaimana tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Lokasi Kawasan Kumuh**

No	Lokasi	Luas (Ha)
1	Besuki	33,13
2	Situbondo	52,20
3	Jangkar	10,17
4	Banyuputih	25,78
5	Banyuglugur	11,04
	<b>Jumlah</b>	<b>132,32</b>

Realisasi capaian penurunan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2019 adalah 60,54 % dengan luas kawasan tertangani 52,2 ha. Sisa penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebesar 60,55 %. Program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman, Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan.

Investasi kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan dalam upaya penurunan luasan kawasan permukiman kumuh antara lain: perkerasan jalan dan rehabilitasi jalan lingkungan, pembangunan jamban keluarga, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan MCK, pembangunan sarana dan prasarana persampahan, penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pembangunan Taman.

Penanganan penurunan luasan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan dengan konsep kolaborasi pendanaan dari OPD, Dana Desa (DD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan *stakeholder* lainnya.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**DPKP Kab. Situbondo**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi Tahun		
				2017	2018	2019
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	43,41 %	37,78%	42,89 %	50,54 %
		Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	60,54 %	80 %	60,54 %	60,54 %

Tabel 3.2 menggambarkan perbandingan kinerja DPKP tahun 2017 sampai tahun 2019. Capaian kinerja indikator persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Hal ini karena



program tersebut sudah menjadi prioritas Pemerintah Daerah agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak huni.

Capaian indikator persentase penurunan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sama yaitu 60,54%. Target lokasi penanganan kawasan kumuh pada tahun 2019 masih tetap yaitu di Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo dengan luas 52,20 Ha. Pada tahun 2018 dan 2019 capaian kinerjanya sama yaitu sebesar 60,54 %. Hal ini disebabkan karena di Kelurahan Dawuhan masih terdapat persoalan kekumuhan.

Intervensi kegiatan dilakukan dengan sumber dana APBD Kab. Situbondo dan dari BDI (Bantuan Dana Investasi) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sehingga terjadi penurunan luas kawasan kumuh dan tingkat kekumuhan lokasi kawasan kumuh. Tingkat kekumuhan Kelurahan Dawuhan pada tahun 2018 mempunyai nilai skoring 15 dan pada akhir tahun 2019 nilai skoringnya 5 yang berarti sudah tidak kumuh.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**  
**DPKP Kab. Situbondo**

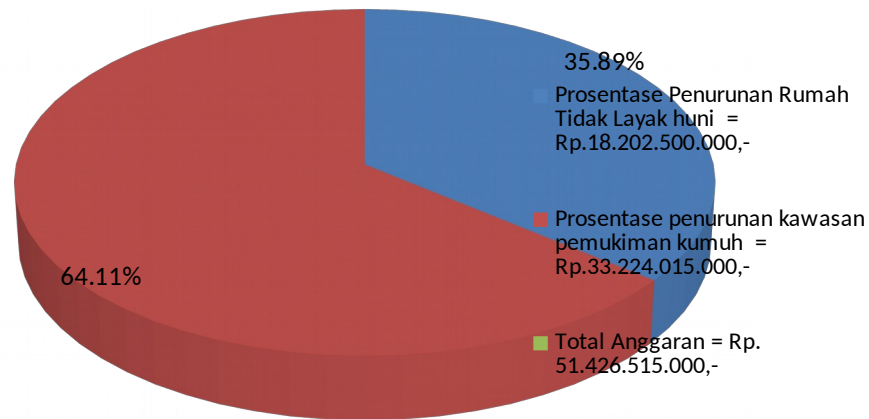
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	51,02 %	50,54%	99,06%
	Persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh	36,36 %	60,54%	60 %

Tabel 3.4 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja DPKP tahun 2019 dengan target pada akhir periode Renstra. Capaian kinerja tahun 2019 bila dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra mengalami peningkatan pada semua indikator. Persentase penurunan rumah tidak layak huni mengalami tingkat kemajuan sebesar 99,06%. Hal ini menunjukkan bahwa 0,94 % lagi target Renstra akan tercapai. Indikator Persentase penurunan kawasan pemukiman kumuh mengalami tingkat kemajuan sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa 40% lagi target di akhir periode Renstra akan tercapai.

### 3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai kinerja utama DPKP adalah sebesar Rp. 51.426.515.000,- Dana ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Situbondo, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana dari APBN.

#### Alokasi Anggaran per IKU



Gambar 3.1 Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

#### Gb. 3.1 Diagram Alokasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Utama

Alokasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja yang ada di DPKP Kab. Situbondo dapat dilihat pada gambar 3.1. Anggaran untuk indikator Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni yaitu sebesar Rp. 18.202.500.000,- atau 35,89 % dari total anggaran untuk pembangunan. Anggaran ini diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin melalui Program Pengembangan Perumahan.

Sedangkan anggaran untuk indikator Persentase kawasan pemukiman kumuh yang ditangani yaitu sebesar Rp. 33.224.015.000,- atau 64,11%. Anggaran ini diperuntukkan untuk menata kawasan kumuh yang ada di perkotaan dan untuk penyediaan sarana

prasarana perkotaan seperti pembangunan taman kota, pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman dan Program Pengelolaan Lingkungan Perkotaan.

**Tabel 3.5**  
**Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Sisa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=(9:7)*100	11
1.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	43,41	50,54	116	18.202.500.000,-	17.625.453.050,-	725.796.950,-	3,96 %	Efisien 3,96%
		Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	60,54	60,54	100	32.786.515.000,-	25.257.230.224,-	7.529.284.776,-	22,96%	Efisien 22,96%

Tabel 3.5 menjelaskan tentang tingkat efisiensi kinerja dan anggaran masing-masing indikator. Capaian kinerja indikator persentase penurunan rumah tidak layak huni sebesar 116%. Target anggaran sebesar Rp. 18.202.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.625.453.050,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 725.796.950,- menyebabkan tingkat efisiensi sebesar 3,96%.

Capaian kinerja persentase penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 100% Target anggaran sebesar Rp. 32.786.515.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.257.230.224,- sisa anggaran Rp. 7.529.284.776,- menyebabkan tingkat efisiensi 22,96%.

Berikut ini dapat dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan/atau telah digunakan guna mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2019**

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>16.142.554.000,00</b>	<b>15.988.597.715,00</b>	99,05
1	Penyediaan jasa surat menyurat	858.000,00	280.000,00	32,63
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000.000,00	14.969.712.265,00	99,80

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.330.000,00	20.066.300,00	86,01
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	225.090.000,00	201.875.000,00	89,69
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	228.997.600,00	221.989.300,00	96,94
6	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	61.150.000,00	50.121.000,00	81,96
7	Penyediaan alat tulis kantor	62.643.900,00	51.862.800,00	82,79
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.122.500,00	33.581.950,00	92,97
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.813.000,00	5.620.000,00	63,77
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,00	3.180.000,00	75,71
11	Penyediaan makanan dan minuman	39.048.000,00	20.644.000,00	52,87
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	262.800.000,00	232.027.700,00	88,29
13	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis (THL)	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
14	Pengadaan Kain Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Kelengkapannya	20.830.000,00	20.266.400,00	97,29
15	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	47.505.000,00	47.190.000,00	99,34
16	Kegiatan Pendukung Hari - hari Besar Nasional dan Keagamaan	23.166.000,00	17.063.000,00	73,66
17	Dukungan pelaksanaan harjakasi	20.000.000,00	15.118.000,00	75,59
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	1.299.993.250,00	1.010.225.276,00	77,71
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00	224.300.000,00	89,72
2	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	251.000.000,00	247.879.500,00	98,76
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.000.000,00	68.560.126,00	97,94

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	728.993.250,00	469.485.650,00	64,40
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>122.400.000,00</b>	<b>38.827.800,00</b>	31,72
1	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	10.000.000,00	1.067.400,00	10,67
2	Laporan Prognosis	5.000.000,00	0,00	-
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000,00	6.901.000,00	69,01
4	Penyusunan RKA dan DPA	20.000.000,00	11.146.000,00	55,73
5	Penyusunan LPPD	6.000.000,00	2.755.800,00	45,93
6	Penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal	15.000.000,00	1.834.400,00	12,23
7	Penyusunan Renja SKPD	10.000.000,00	294.400,00	2,94
8	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja dan RKPD (Dalev)	10.000.000,00	5.388.600,00	53,89
9	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000,00	2.773.400,00	27,73
10	Penyusunan LKPJ	10.000.000,00	2.072.400,00	20,72
11	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan SAKIP	16.400.000,00	4.594.400,00	28,01
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1.798.750.000,00</b>	<b>1.510.453.050,00</b>	83,97
1	Biaya Penunjang RTLH BPS	100.000.000,00	39.253.275,00	39,25
2	Biaya Penunjang RTLH	300.000.000,00	253.983.400,00	84,66
3	Operasional DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK Reguler)	148.750.000,00	124.620.575,00	83,78
4	Pengadaan Lahan Untuk Perumahan Atlit Berprestasi Kabupaten Situbondo	100.000.000,00	-	-

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
5	Penyusunan Data Base & Analisa Perumahan & Permukiman sesuai Peruntukannya pada Rencana Tata Ruang di Kec. Panji Kab. Situbondo	100.000.000,00	97.903.600,00	97,90
6	Penyusunan Data Base & Analisa Perumahan & Permukiman sesuai Peruntukannya pada Rencana Tata Ruang di Kec. Panarukan Kab. Situbondo	100.000.000,00	97.392.600,00	97,39
7	Penyusunan Data Base dan DED PSU Perumahan di Kabupaten Situbondo	600.000.000,00	597.203.000,00	99,53
8	Penyusunan Perda Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan (PSU) Kabupaten Situbondo	350.000.000,00	300.096.600,00	85,74
<b>V</b>	<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.997.500.000,00</b>	<b>2.789.525.873,73</b>	93,06
1	Pembangunan MCK ++ PP. TUHFATUL ULUM Desa Plalangan Kec. Sumbermalang	300.000.000,00	294.534.400,00	98,18
2	Pembangunan MCK Kp. Pesisir Desa Kettah Kec. Suboh	75.000.000,00	73.345.630,00	97,79
3	Biaya Penunjang DAK bidang Sanitasi (DAK Affirmasi)	280.000.000,00	254.187.550,00	90,78
4	Biaya Penunjang DAK bidang Sanitasi (DAK Penugasan)	157.500.000,00	157.500.000,00	100,00
5	Pembangunan Tandon Kawasan Wisata Pasir Putih Kec. Bungatan	50.000.000,00	48.564.913,00	97,13
6	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan Panorama Indah Desa Sumberkolak Kec. Panarukan	500.000.000,00	494.598.480,00	98,92
7	Pembangunan Penahan Jalan Lingkungan Perumahan Istana Mutiara Desa Sumberkolak Kec. Panarukan	200.000.000,00	196.787.989,00	98,39
8	Perkerasan Jalan Lingkungan Perum Graha Kencana Raya Kec. Panji	150.000.000,00	147.988.855,00	98,66
9	Pembangunan Saluran Drainase Perum Graha Kencana Raya Kec. Panji	150.000.000,00	145.641.690,00	97,09
10	Pembangunan Toilet Kawasan Wisata Pasir Putih Kab. Situbondo	585.000.000,00	570.773.391,73	97,57

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
11	Penyusunan Data Base Infrastruktur Sanitasi Kabupaten Situbondo	50.000.000,00	44.781.000,00	89,56
12	Biaya Operasional Jamban Keluarga Kabupaten Situbondo	200.000.000,00	191.276.550,00	95,64
13	Biaya Operasional DAK Sanitasi Kabupaten Situbondo	200.000.000,00	169.545.425,00	84,77
14	Sosialisasi Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Situbondo	100.000.000,00	0,00	-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERKOTAAN</b>	<b>16.251.912.000,00</b>	<b>15.546.728.616,00</b>	95,66
1	Pembangunan Taman Lapangan Kalianget Kec. Banyuglugur	2.150.000.000,00	2.103.901.676,00	97,86
2	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Wilayah Barat Kabupaten Situbondo	550.000.000,00	530.932.600,00	96,53
3	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Wilayah Tengah Kab. Situbondo	550.000.000,00	537.317.000,00	97,69
4	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Wilayah Pantai Pathek Kec. Panarukan	200.000.000,00	193.686.319,00	96,84
5	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Menuju Wisata Rengganis Kec. Sumbermalang	300.000.000,00	292.363.420,00	97,45
6	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Menuju Wisata Kayumas Kec. Arjasa	200.000.000,00	194.031.537,00	97,02
7	Pembangunan Taman Kedungdowo Kec. Arjasa	200.000.000,00	194.712.580,00	97,36
8	Pengadaan dan Penanaman Bunga Kec. Situbondo	75.000.000,00	73.240.725,00	97,65
9	Pengadaan dan Penanaman Bunga Kec. Panji	50.000.000,00	48.987.391,00	97,97
10	Pembangunan Taman Bantaran Sungai DAM Siluice Kecamatan Panji	100.000.000,00	96.223.442,00	96,22
11	Pembangunan Taman Wisata Tampora Kecamatan Banyuglugur	150.000.000,00	145.746.390,00	97,16
12	Pembangunan Taman Batas Kabupaten di PLTU Paiton Kecamatan Banyuglugur	75.000.000,00	72.511.001,00	96,68



No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
13	Pembangunan Taman Bantaran Sungai Jl. Hasan Assegaf Kecamatan Situbondo	169.680.000,00	164.961.608,00	97,22
14	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kelurahan Ardirejo Kec. Situbondo	24.000.000,00	0,00	-
15	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Desa Panji Lor Kec. Panji	210.000.000,00	203.554.609,00	96,93
16	Pembangunan Taman Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang	75.000.000,00	73.262.894,00	97,68
17	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Suboh, Kecamatan Besuki, Kecamatan Mlandingan dan Kecamatan Panarukan	425.000.000,00	409.569.333,00	96,37
18	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Panarukan dan Kecamatan Kendit	360.000.000,00	350.689.600,00	97,41
19	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Kapongan	500.000.000,00	487.582.028,00	97,52
20	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Mangaran	50.000.000,00	47.371.000,00	94,74
21	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Bungatan	700.000.000,00	684.976.564,00	97,85
22	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jangkar	550.000.000,00	539.807.050,00	98,15
23	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Wilayah Barat Kab. Situbondo	100.000.000,00	96.989.015,00	96,99
24	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Wilayah Tengah Kab. Situbondo	200.000.000,00	194.625.400,00	97,31
25	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Wilayah Timur Kab. Situbondo	100.000.000,00	95.685.701,00	95,69
26	Pengadaan Kursi Taman Blitok Kec. Bungatan	87.500.000,00	86.350.000,00	98,69
27	Pengadaan Kursi Taman Lamongan Kec. Arjasa	87.500.000,00	85.965.000,00	98,25
28	Pembangunan Taman PG Panji Kec. Panji	1.100.000.000,00	1.078.759.436,00	98,07

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
29	Pembangunan Papan Identitas Wil. Tengah Kab. Situbondo	200.000.000,00	195.051.107,00	97,53
30	Pembangunan Papan Identitas Wil. Timur Kab. Situbondo	200.000.000,00	195.477.898,00	97,74
31	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec Jangkar Kec. Asembagus dan Kec. Banyuputih	200.000.000,00	195.622.715,00	97,81
32	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Kapongan dan Kec. Besuki	180.000.000,00	171.518.865,00	95,29
33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum Wilayah Barat	200.000.000,00	189.493.355,00	94,75
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum Wilayah Tengah	350.000.000,00	337.280.250,00	96,37
35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum Wilayah Timur	200.000.000,00	187.183.140,00	93,59
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertamanan	533.066.000,00	514.530.843,00	96,52
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Petamanan dan PJU	1.635.000.000,00	1.570.000.000,00	96,02
38	Jasa Satgas Kebersihan Taman Alun-alun Situbondo, Panji, dan Karangasem Kab. Situbondo	210.000.000,00	140.000.000,00	66,67
39	Sewa lahan Taman Kec. Panji	120.000.000,00	112.860.000,00	94,05
40	Peningkatan Sarana & Prasarana Taman Belakang PG Panji Kec. Panji	200.000.000,00	196.491.693,00	98,25
41	Perbaikan Lampu PJU Kab. Situbondo	200.000.000,00	195.420.980,00	97,71
42	Pengadaan dan Penanaman Bunga Kab. Situbondo	100.000.000,00	97.622.520,00	97,62
43	Rehabilitasi Taman Alun-alun Besuki	200.000.000,00	195.231.279,00	97,62
44	Rehabilitasi Taman Pot dan Median Jalan Asembagus	75.000.000,00	73.511.689,00	98,02
45	Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Karangasem Kel. Patokan Kec. Situbondo	75.000.000,00	73.188.035,00	97,58
46	Peningkatan sarana prasarana Taman Panji Kec. Panji	200.000.000,00	196.249.270,00	98,12
47	Peningkatan sarana prasarana Taman Panji Permai Kec. Panji	75.000.000,00	73.249.000,00	97,67
48	Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Lamongan	300.000.000,00	293.546.091,00	97,85

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
49	Pemeliharaan Pot dan Median Jalan Kab. Situbondo	124.000.000,00	118.815.928,00	95,82
50	Pengecatan Tugu batas Banyuglugur, Kalibagor, dan Banyuputih	150.000.000,00	0,00	-
51	Pelatihan Teknis Tenaga Lapangan Pertamanan dan PJU	100.000.000,00	88.488.000,00	88,49
52	Penyusunan Data Base dan DED Taman sudut kota Kabupaten Situbondo	50.000.000,00	48.537.500,00	97,08
53	Penyusunan Data Base Pemakaman Umum	50.000.000,00	48.246.000,00	96,49
54	Rehabilitasi Lampu Hias Wilayah Barat Kab. Situbondo	75.000.000,00	73.141.840,00	97,52
55	Rehabilitasi Lampu Hias Wilayah Tengah Kab. Situbondo	100.000.000,00	96.240.960,00	96,24
56	Rehabilitasi Lampu Hias Wilayah Timur Kab. Situbondo	75.000.000,00	71.792.800,00	95,72
57	Peningkatan Fasilitas Taman Blitok Kec. Bungatan	586.166.000,00	566.644.411,00	96,67
59	Rehabilitasi Taman Tugu Batas Banyuglugur, Kalibagor, Banyuputih dan panji	150.000.000,00	147.489.128,00	98,33
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>38.613.109.250,00</b>	<b>36.884.358.330,73</b>	<b>96</b>

Pada Tahun 2019 alokasi Anggaran APBD yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman total anggaran sebesar Rp. 45.508.290.730,00 (*empat puluh lima milyar lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 6.895.181.480,00 (*enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 38.613.109.250,00 (*tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga belas juta seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

DPKP juga mendapat tambahan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi dan perumahan sebesar Rp. 11.287.500.000,00 dan Hibah untuk pembangunan jamban keluarga sebesar Rp. Rp. 1.250.000.000,00 yang melekat pada DPPKAD. Selain itu juga DPKP mendapat dana dari APBN sebesar Rp. 4.637.500.000,00 melalui program BSPS.

Rata-rata kinerja anggaran pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dapat terealisasi sebesar 96 % dari target yang telah ditentukan. Adapun Program dan Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja anggaran antara lain disebabkan karena efisiensi terhadap anggaran (menyesuaikan dengan kebutuhan) sehingga capaian dari realisasi kinerja anggaran ada yang dibawah 50 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Situbondo terpilih maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo untuk membangun dibidang Perumahan dan Permukiman menuju lingkungan yang layak, sehat, dan serasi tentunya apa yang telah dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 masih jauh dari keinginan dan harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan Berpenghasilan Rendah (MBR).

Oleh sebab itu untuk memenuhi semua keinginan dan harapan masyarakat, maka Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo selalu senantiasa akan terus berusaha melakukan upaya guna mewujudkan semua keinginan dan harapan masyarakat yaitu melalui program dan kegiatan yang dapat langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dibidang Perumahan dan Permukiman.

Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini telah memberikan suatu gambaran yang menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo sudah berusaha melaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya secara optimal untuk memenuhi sasaran dan target dalam program dan kegiatan pada Tahun 2019. Hal tersebut telah dapat ditunjukkan dengan melihat capaian dari masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa Sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dikategorikan ***Sangat Berhasil***. Capaian Kinerja Sasaran yang merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama atau yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 - 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. ***IKU I*** : Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni capaian kinerja 116% dengan kategori Sangat Berhasil.
2. ***IKU II*** : Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh capaian kinerja 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

Kemudian untuk capaian kinerja keuangan dari Belanja Langsung yang diterima oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 yang didasarkan pada perhitungan rasio ekonomis, yaitu perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan

rencana anggaran belanja pada Anggaran Tahun 2019 adalah sebesar 96% dan dapat dikatakan efektif dan efisien.

Namun tentunya masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan yang belum dapat kami capai sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, oleh sebab itu untuk selanjutnya kami mohon saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun dari semua lapisan masyarakat agar dalam pelaksanaan serta implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo akan lebih tepat sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo Tahun 2019 ini tersajikan, dengan harapan bahwa laporan ini akan bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan informasi dari keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta solusi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan, khususnya pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Situbondo pada Tahun 2019 dan tahun selanjutnya.

Situbondo, 20 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SITUBONDO**



**Ir. H. EKO PRAYUDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610726 199307 1 001